

Model Relasi Politik Birokrasi dalam Persepsi Pejabat Publik (Suatu Studi pada Pemerintah Kota Bima)

Tauhid*, Mukhlis Ishaka

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mbojo, Kelurahan Mande, Kota Bima, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tauhidmbojo1969@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan antara politik dan birokrasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dicermati karena hal ini menyangkut kepentingan antara pejabat pembuat kebijakan dengan stakeholder yang terkait politik kebijakan pemerintah daerah. Kadang kedua hubungan ini sulit dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang yang memiliki makna dan kepentingan yang sama. Kepentingan politik ini mempengaruhi para pejabat publik dalam melakukan kegiatan birokrasi serta turut memainkan peran dalam menentukan posisi mereka tatkala berhadapan dengan lembaga-lembaga politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang tinggi. Berkaitan dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Model Relasi Politik Birokrasi Dalam Persepsi Pejabat Publik (Suatu Studi Pada Pemerintah Kota Bima). Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Informan penelitian terdiri dari Walikota Bima, Ketua dan wakil Ketua DPRD Kota Bima, Sekretaris Daerah, Kepala BKD, Aasisten Sekda Kota Bima, Ketua Partai Politik, Para Kepala Bidang Lingkup Sekda serta Tokoh Masyarakat, serta Organisasi Sosial dan kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Relasi Politik Birokrasi Dalam Persepsi Pejabat Publik (Suatu Studi Pada Pemerintah Kota Bima) memiliki hubungan yang saling terkait dan saling mendukung baik dalam merumuskan, mengimplementasi serta mengevaluasi kebijakan baik yang bersifat politis maupun administrasi terhadap terselenggaranya birokrasi publik di Pemerintahan Kota Bima. Persepsi pejabat publik dalam kaitan dengan intervensi politik dalam penyelenggaraan kegiatan birokrasi tercermin dalam proses pembangunan, administrasi maupun teknik serta mutasi dan rotasi pegawai tinggi, restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah Kota Bima serta Perumusan Penganggaran Keuangan Daerah Kota Bima selalu terjadi intervensi politik untuk kepentingan baik para pejabat publik maupun pejabat karir dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Bima.

Keywords : Relasi, Politik, Birokrasi

PENDAHULUAN

Kewenangan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah daerah tergambar dari ruang lingkup bidang tugas yang diemban oleh pejabat birokrasi baik itu pejabat publik maupun pejabat administrasi. Pejabat publik memiliki kewenangan kekuasaan yang cukup luas dan kompleks yang menyangkut seluruh tatanan birokrasi pemerintah daerah struktur hirarki kewenangan yang dimiliki dan membawahi seluruh Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD). Dalam menjalankan kekuasaan tidak terlepas dari membangun hubungan dengan relasi politik supaya kekuasaan dapat berjalan dengan lancar. Hubungan relasi politik tercermin dari seberapa besar intervensi mereka dalam hal proses pengambilan kebijakan politik terutama yang menyangkut pelaksanaan program/proyek pembangunan, mutasi dan rotasi pejabat struktural, pengangkatan Aparatur Sipil Negara, dan hal-hal lain yang menyangkut keterlibatan politik dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Jabatan-jabatan dalam birokrasi pemerintah baik di pusat maupun daerah terdiri dari jabatan politik (non-karier) dan jabatan birokrasi (karier). Jabatan Politik dalam administrasi publik merupakan pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Sedangkan jabatan karir adalah para birokrat yang secara normatif melaksanakan kebijakan pembuat kebijakan oleh pejabat publik yang berasal dari politisi (jabatan politik). Jabatan karir merupakan jabatan yang dimiliki oleh seorang PNS, biasanya dalam birokrasi Pemerintah Daerah, jabatan karir tertinggi dipegang oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan jabatan politis, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Walikota/Bupati, Wakil Walikota/Wakil

Bupati, Gubernur, wakil Gubernur, Presiden/ wakil Presiden, beserta para menterinya. Implikasinya adalah, politisi-politisi yang memperoleh kekuasaan politik melalui pemilihan umum menempati jabatan politik sebagai pimpinan pemerintahan, sedangkan jabatan di bawahnya seperti jabatan Sekretaris Jenderal, Dirjen, Inspektorat Jenderal, Sekretaris Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Kepala Biro, Kepala Bidang dan Kepala Seksidan seterusnya dijabat oleh pegawai-pegawai profesioanal (birokrat karier). Berikut disajikan perbedaan keduanya, terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Perbedaan antara Jabatan Politik dan Jabatan Birokrasi

No	Variabel Pembeda	Jabatan politik	Jabatan Birokrasi
1	Cara pengangkatan	Dipilih melalui pemilu	Diangkat ber-dasarkan Kualifikasi tertentu
2	Masa jabatan	Ditentukan (biasanya 5tahun)	Seumur hidup
3	Sifat jabatan	Sewaktu-waktu bisa diberhentikan	Tidak bisa diber-hentikan kecuali ybs meminta berhenti
4	Pertanggung jawaban	Bertanggung jawab kepada konstituent yg memilih-nya	Bertanggung jawab kepada negara

Sumber: dikutip dari dalam Wayu Eko

Yudiatmaja(<https://www.google.com/search?q=Politisasi+Birokrasi%3A+Pola+Hub+Politik+dan+Birokrasi+di+Indonesia&oq=Politisasi+Birokrasi%3A+Pola+Hubungan+Politik+dan+Birokrasi+di+Indonesia&aqs=chrome..69i57j204>).

Berkaitan dengan itu Pemerintah Kota Bima sebagai salah satu daerah otonom di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung Timur Pulau Sumbawa sejalan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbaru membawahi 31 buah dan 5 Kecamatan serta dan 41 kelurahan. Pada tahun 2018, jumlah penduduknya mencapai 166.407 jiwa yang terdiri atas 81.725 jiwa penduduk laki-laki dan 84.682 jiwa penduduk perempuan dengan luas wilayah 222,25 km² dan sebaran penduduk 635 jiwa/km². Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sejalan dengan daerah otonom maka pemerintah Kota Bima dalam menjalankan roda pemerintahan tentu tidak terlepas dari dukungan politik baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, stakeholder politik (Pimpinan Partai Politik pendukung, para konsultan politik, NGO, para Tim Sukses dan simpatisan), Akademisir (Perguruan Tinggi), Organisasi Sosial kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, para Tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat yang lebih dekat dengan kekuasaan. Keputusan-keputusan politik yang diambil oleh Pejabat Publik dalam hal ini Bupati Bima dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan roda birokrasi Pemerintah Kota Bima baik yang menyangkut kepentingan institusi Organisasi Perangkat daerah Kota Bima dan lebih-lebih masyarakat sebagai obyek dari pemerintah daerah dalam menjalankan kekuasaannya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik apalagi keputusan itu sangat strategis.

Berkaitan dengan itu peneliti, mengangkat judul riset ini adalah Model Relasi Politik Birokrasi Dalam Persepsi Pejabat Publik (Suatu Studi Pada Pemerintah Kota Bima). Penelitian ini bertujuan :

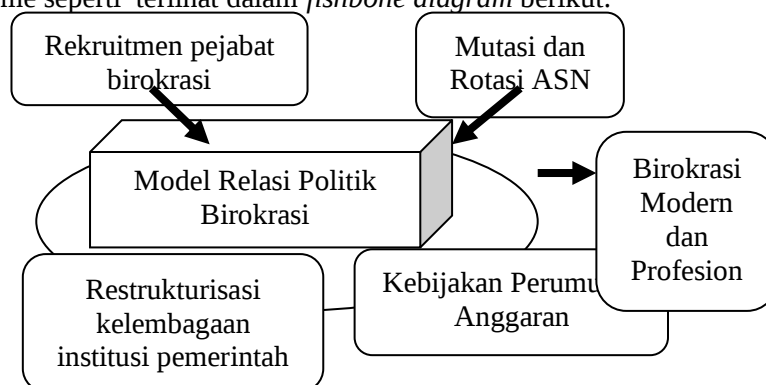
- Untuk mendeskripsikan model relasi politik birokrasi dalam persepsi pejabat publik (Suatu Studi Pada Pemerintah Kota Bima).
- Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong model relasi politik birokrasi dalam persepsi pejabat publik (Suatu Studi Pada Pemerintah Kota Bima).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan dan menemukan suatu fenomena yang memiliki karakter unik dalam model relasi politik birokrasi dalam persepsi pejabat publik (Suatu Studi Pada Pemerintah Kota Bima).

Penelitian ini bersifat teoritikal yang akan dilaksanakan dalam dua tahap sebagai strategi implementasi riset di lapangan. Tahap pertama peneliti melaksanakan kegiatan *field research* melalui pendekatan *phenomenography* dalam ranah kualitatif. Di sini, peneliti langsung ke sasaran yakni Pemerintah Kota Bima dengan informan yang dipilih secara purposive dengan jumlah antara 41 informan. Pada tahap awal ini data lapangan diperlukan dalam rangka untuk mengetahui relasi politik birokrasi. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), focus group discussion (FGD) dan studi dokumenter. Tahap Kedua, berdasarkan hasil *field research* tersebut akan dibuat model relasi politik birokrasi. Strategi kegiatan penelitian ini akan dilakukan dengan mekanisme seperti terlihat dalam *fishbone diagram* berikut:



Gambar 1 Strategi Kegiatan Penelitian

Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu: (1). Informan yang dipilih secara purposive pada subyek penelitian yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti adalah pejabat eselon II, III, dan IV masing-masing 6 orang yang akan dijadikan informan. Sedangkan informan dengan sistem metode snow ball antara lain anggota DPRD Kota Bima 5 orang, kalangan akademisi 5 orang, pegawai 10 orang, pejabat 3 orang. Total seluruh informan adalah 41 orang sebagai informan. (2). Dokumen, berupa bahan-bahan tertulis antara lain peraturan, laporan, arsip dan lain sebagainya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pentahapan Penelitian

Penelitian diawali dengan tahap pertama yaitu proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*) setelah melalui penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pendekatan terhadap subyek penelitian untuk menjelaskan rencana dan maksud kedatangan peneliti dan sekaligus menfokuskan pada identifikasi masalah di lapangan berkaitan dengan model relasi

politik birokrasi sebagai pilar memperkuat integrasi nasional di Kota Bima. Tahap kedua ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*), peneliti berusaha menangkap makna dan informasi dari hasil pengamatan. Tahap ketiga pengumpulan data (*logging the data*), pada tahap ini ada tiga macam tehnik pengumpulan data dilakukan yaitu: observasi yang mengamati secara langsung dengan menemukan peristiwa yang secara alamiah atau natural yang berkaitan dengan rekrutmen pejabat misalnya struktur dan kondisi pemerintahan, aktor-aktor yang terlibat dalam rekrutmen, kondisi filosofi budaya, konstelasi politik lokal. Wawancara mendalam (*In Depth-Interview*), dilakukan untuk mendapatkan informasi (data empiris) yang berkaitan dengan pemahaman tentang: model relasi politik birokrasi pemerintahan baik menyangkut pelaksanaan rekrutmen, kebijakan pemerintah yang terbuka dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Dokumentasi, melalui tehnik ini peneliti menghimpun berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yang menggambarkan rekrutmen yang bisa menjadi landasan analisis untuk melihat model relasi politik birokrasi dan berbagai aturan normatif Tahapan keempat analisis data melalui beberapa komponen yaitu: (1). reduksidata (*reduction data*), adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan terutama yang berkaitan dengan substansi penelitian. (2). penyajian data (*data display*) adalah merupakan alur penting dari kegiatan analisis dimana peneliti membatasi sajiannya dari suatu kumpulan informasi yang telah tersusun berdasarkan pada fokus penelitian dan tujuan penelitian. (3). penarikan kesimpulan (*concluding drawing*) adalah peneliti selalu mereduksi data dan sajian sampai pada penyusunan kesimpulan berdasarkan data yang ada pada fieldnote, peneliti berusaha membuat pemahaman dari segala peristiwa dan dibuat dalam penyusunan data yang bersifat narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Bima berdasarkan tatakelola struktur organisasi Perangkat Daerah sebanyak 43 buah dan 18 Kecamatan serta dan 191 desa. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Keadaan Struktur Organisasi Berdasarkan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kota Bima

No.	Nama Organisasi	Jumlah Asisten/ Bag./ Bidang/ Kasi/ Kaur
1.	Sekretariat Daerah	44
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,	14
3.	Dikbud	39
4.	Inspektorat	9
5.	Dinas Kesehatan	39
6.	Dinas Sosial	35
7.	Dinas Tenaga Kerja	25
8.	Dinas Kominfo	19
9.	Dinas Perhubungan	19
10.	Dinas Duk Capil	25
11.	Dinas Pariwisata	17
12.	Dinas PU & Tata Ruang	21
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,	20
14.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	21

15.	Dinas Dinas Statistik Daerah	17
16.	Dinas Pertanian	29
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	23
18.	Dinas Lingkungan Hidup	16
19.	Dinas Pemberdaya-an Perempuan dan Perlindungan Anak	16
20.	DinasPengendalian Penduduk dan KB	27
21.	Dinas Ketahanan Pangan	14
22.	Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	Satuan Pol PP	13
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
26.	BPBD	16
27.	Bappeda dan Litbang	21
28.	BKD &Pengembgn SDM	17
29.	BPPKAD	23
30.	Camat, Sekretaris dan Kasi	20
31	Lurah. Sekretaris dan Kasi	123
	Total	735

Sumber : Perda Nomor : 5 Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut bahwa Jabatan karir yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bima sebanyak 783 buah sampai pada level pemerintah Kecamatan dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis baik di masing-masing kecamatan bahkan sampai pada level kelurahan. Sementara itu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja pada berbagai Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) sebanyak 4.058 orang yang terdiri dari berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.139 orang dan Laki-laki sebanyak 1.919 orang.

Para Aparatur Sipil Negara tersebut bekerja sesuai dengan landasan yang diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. Pada level Pemerintah Daerah Keputusan yang telah diambil berdasarkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Oleh karena selama kurun 5 tahun terakhir jumlah keputusan yang telah diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, dapat dijelaskan menurut tabel berikut ini :

Gambar1 Jumlah Keputusan DPRD Kota Bima antara tahun 2013-2017



Gambar 2. Jumlah Keputusan DPRD Kota Bima Tahun 2013-2017

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa keputusan yang diambil DPRD Kota Bima atas usulan Rancangan Peraturan oleh eksekutif, setiap tahun mengalami peningkatan hal ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan DPRD Kota Bima selaku lembaga politik dalam

menghasilkan keputusan-keputusan politik, sebagai implementasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut oleh eksekutif selama satu periode tertentu.

Selanjutnya stakeholder DPRD Kota Bima yang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pelaksana kebijakan oleh Pemerintah Kota Bima, baik untuk kepentingan eksekutif itu sendiri maupun kepentingan masyarakat, maka Anggota DPRD Kota Bima yang merupakan diusung oleh masing-masing Partai Politik yang ada di Kota Bima. Berikut ini disajikan susunan anggota DPRD Kota Bima Periode 2019-2024, sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD Kota Bima Periode 2019-2024

No.	Utusan Parpol	Jumlah
1.	Partai Golongan Karya	3
2.	Partai Amanat Nasional	3
3.	Partai Demokrat	3
4.	Partai Bulan Bintang	3
5.	Partai PPP	2
6.	Partai Nasional Demokrat	2
7.	Partai Gerindra	2
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
9.	Partai Keadilan Sejahtera	2
10.	Partai Hanura	2
11.	Partai Perindo	1
	Total	25

Berdasarkan data tersebut menunjuk-kan bahwa dengan bertambahnya Partai Politik yang mengisi deretan anggota DPRD Kota Bima berarti akan bertambah memberikan kontribusi terhadap perubahan dinamika dalam mewarnai pelaksanaan birokrasi pemerintah Kota Bima. Keputusan yang diambil berdasarkan sinergitas kepentingan politik antara Pemerintah Kota Bima dengan Anggota DPRD Kota Bima dalam melahirkan keputusan-keputusan yang strategis.

Pembahasan Penelitian

Model relasi politik birokrasi dalam persepsi pejabat pulik pada Birokrasi Pemerintah Kota Bima mencakup : 1). Rekrutmen pejabat birokrasi , 2) Mutasi atau Rotasi Pejabat birokrasi, 3) Restrukturisasi kelembagaan institusi pemerintah dan 4) Pola Perumusan Penganggaran Pemerintah baik rutin maupun pembangunan serta 5) Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah baik Dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

1. Rekrutmen pejabat birokrasi

Dalam kaitam dengan politik birokrasi Pemerintah Kota Bima memiliki ciri dan karakteristik memiliki hubungan yang erat bagaikan dua mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan satu sama lain. Dalam pandangan birokrasi dan politik memang merupakan dua buah institusi yang memiliki karakter yang sangat berbeda, namun harus saling mengisi. Dua karakter yang berbeda antara dua institusi ini pada satu sisi memberikan sebuah ruang yang positif bagi apa yang disebut dengan sinergi, namun acapkali juga tidak dapat dipisahkan dengan aroma perselingkuhan. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang diamandemen yakni pasal 18 (4) yang menyatakan bahwa :

Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis, yakni pemilihan kepala pemerintah daerah dilaksanakan secara langsung (Pilkada). Hal tersebut sesuai dengan nafas demokrasi yang merupakan sistem politik yang menetapkan kekuasaan dari oleh dan untuk rakyat sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu pencetus ajaran Trias Politika.

Sejak pilkada bergulir pada pertengahan tahun 2018 di Kota Bima, para pejabat pemerintah atau birokrat banyak yang turut ambil bagian. Mereka meninggalkan jabatannya untuk meraih jabatan yang lebih tinggi. Birokrat yang *notabene* adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) memang tidak dilarang mencalonkan diri dalam pilkada. Diterapkannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, menjanjikan sejumlah harapan, antara lain, diyakini akan mampu untuk mewujudkan tatanan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Namun demikian, juga harus disadari bahwa *ekspektasi* tersebut hanya akan dapat mencapai, atau paling tidak, mendekati kenyataan, bila berangkat dari asumsi *substantive democracy*, yaitu suatu tatanan demokrasi yang telah di tandai oleh eksisnya perilaku demokrasi (*democratic behaviour*) baik pada tataran elit penyelenggara pemerintahan, maupun di kalangan masyarakat. maka dapat dipastikan sebahagian besar masyarakat telah memahami betul arti penting Pilkada, dan kalaupun diberikan hak kebebasan politik (*political liberties*), mereka telah memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan, dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut secara rasional.

Hal Senada sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan bahwa Pemilihan Kepala Daerah memberikan implikasi terhadap keterlibatan secara politik para pejabat karir (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) dan unsur pimpinan dibawahnya dalam menyukseskan salah seorang calon Kepala Daerah yang dianggap ada peluang menang. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepentingan pribadi pejabat tersebut terhadap jabatan yang akan diemban atau dipimpin kedepan.

Berdasarkan pendapat tersebut memang benar bahwa hubungan relasi politik yang dibangun sejak awal ketika pencalonan Kepala Daerah sampai proses sehingga Calon Kepala Daerah tersebut menjadi pemenang dalam Pilkada begitu yang terjadi di Kota Bima. Pada saat itu sudah mulai ada gejala mengenai rekruitmen pejabat karir untuk menduduki jabatan pada Lingkup Pemerintah Kota Bima, walaupun secara aturan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang pengangkatan jabatan struktural berdasarkan uji kompetensi, dimana ditegaskan bahwa menjamin obyektivitas, kualitas, dan transparansi dalam pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan kompetensinya, perlu dilakukan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Namun dalam kenyataan bahwa Rekruitmen Aparatur Sipil Negara untuk diangkat menjadi Pejabat Struktural dan mengisi kekosongan jabatan struktural baik pada Eselon II, Eselon III dan Eselon IV kadang tidak melalui Uji Kompetensi atau penilaian karir pegawai namun berdasarkan pendekatan politik yang paling dominan melalui usulan-usulan dari stakeholder politik itu yang menjadi pertimbangan utama, karena dalam hal ini Pejabat Publik dalam hal ini walikota dan Wakil walikota Bima dipilih oleh rakyat melalui kaderisasi usulan dari partai politik pengusung pada saat pemilihan Kepala Daerah .

2 Mutasi atau Rotasi Pejabat birokrasi.

Setelah dilantiknya sebagai Walikota Bima, maka H. Muhammad Lutfi, SE, Walikota Bima melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kota Bima di aula Kantor Walikota Bima. Pelantikan ini merupakan kali pertama dalam masa pemerintahan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023. Para pejabat yang dilantik sebanyak 6 orang Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 2 orang Pejabat Administrator (Eselon III). Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1972/BKPSDM/XII/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Pada Mutasi Pejabat Lingkup Pemkot Bima yang kedua kali Kamis 19 Agustus 2019, Walikota Bima melantik 76 orang pejabat baik eselon II, Eselon III dan Eselon IV, Administrator dan Pengawas. Pada Mutasi yang kedua ini Walikota Bima menegaskan bahwa semua pejabat yang dilantik ini merupakan murni kebutuhan

organisasi sebab berdasarkan hasil analisa bersama Wakil Walikota Bima dan Jajarannya. Penempatan ini untuk mengoptimalkan kerja lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan memberikan suatu pendapat bahwa mutasi pejabat di Lingkup Pemkot Bima sarat dengan kepentingan politik, sehingga para pegawai yang berkompeten di copot dan diganti dengan pejabat yang baru yang notabene karena bagian dari Tim Sukses dalam proses Pemilukada Tahun 2018 artinya mutasi balas jasa politik.

Lebih lanjut informan lain berpendapat kami para ASN yang menjadi korban dari kepentingan politik akan mengadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tidak menerima keputusan Walikota Bima atas pencopotan kami sebagai pejabat dan menjadi staf.

Kebijakan Rotasi dan Mutasi menjadi momok bagi Aparatur Sipil Negara (bahkan kontroversial) mutasi Lingkup Pemerintah Kota Bima belakangan ini, menjadi heboh karena diadukan ke KASN. Sehingga Walikota Bima Muhammad Lutfi, SE harus datang ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk meminta klarifikasi terkait adanya pengaduan terkait dengan Mutasi dan Rotasi Pejabat Lingkup Pemkot Bima, pada kesempatan itu Walikota Bima mengakui jika mendemosi dan menonjokkan Pejabat ASN Pemkot Bima dengan tidak berpedoman pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Disamping itu dalam berita Media Suara NTB.com Kabupaten .Bima, 2 September 2019 mengindikasikan bahwa mutasi dan Rotasi Pejabat Eselon II, III dan IV untuk menduduki Jabatan tertentu Lingkup Pemerintah Kota Bima, diindikasikan adanya praktek transaksional (Mahar) artinya sejumlah pejabat harus membayar sekian atau sejumlah uang untuk menduduki Jabatan tertentu. Walaupun hal itu dibantah sendiri oleh Walikota Bima bahwa tidak ada uang mahar ataupun tarif dalam pergantian atau proses mutasi dan rotasi pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima. Lebih lanjut Walikota Bima mengatakan bahwa rotasi dan mutasi murni karena kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kelayakan dan berdasarkan penilaian Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Dengan demikian bahwa dalam mutasi dan rotasi Pejabat pada Lingkup Pemerintah daerah termasuk Pemkot Bima, berlandaskan pada Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. Kalau dilakukan hal semacam ini dan berlandaskan pada Ketentuan Peraturan penempatan ASN dengan benar tidak ada konflik atau masalah di seputar mutasi atau rotasi ASN.

3. Restrukturisasi kelembagaan institusi pemerintah.

Restrukturisasi penataan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dalam mereformasi birokrasi pemerintah di daerah. Birokrasi di daerah dikenal dengan struktur gemuk, perlu dilakukan penataan kembali agar terjadi efisiensi baik struktur maupun penganggaran.

Implementasi kebijakan restrukturisasi kelembagaan daerah terutama pada organisasi perangkat daerah diharapkan dapat menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal dalam kerangka tata pemerintahan yang baik.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan penelitian, adalah restrukturisasi kelembagaan dalam organisasi perangkat daerah sebagai wujud dalam membentuk organisasi perangkat daerah yang kuat, efisien, solid, cepat dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan restrukturisasi

kelembagaan dengan melakukan mergenisasi kelembagaan yang mencakup : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima, Badan Lingkungan hidup dan Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pemadam kebakaran, menjadi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Masih ada beberapa Bidang atau bagian yang dimerger dalam upaya untuk efisiensi dalam perampingan struktur organisasi perangkat daerah.

Menurut Sedermayanti (2000:60), upaya restrukturisasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui upaya manajemen dengan cara melakukan penataan ulang atau rekayasa ulang (*reengineering*) sehingga organisasi dapat melakukan adaptasi terhadap pengaruh perubahan lingkungannya. Dengan tujuan sebagaimana dikemukakan oleh Gouilart dan Kelly (1995:7) adalah : “Menyiapkan Perusahaan/Organisasi untuk dapat mencapai tingkat kompetisi yang digunakan, hal ini berhubungan dengan organisasi yang ramping dan fit.

Terkait dengan restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah daerah, maka keterkaitan dengan politik birokrasi terutama dalam hal mengisi komposisi jabatan yang diperebutkan sehingga dalam hal ini, mau tidak mau harus bermain pada tataran kepentingan antara Pejabat publik dengan para Aparatur Sipil Negara untuk memperebutkan jabatan yang lowong akibat dampak dari kebijakan restrukturisasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

Hal ini sejalan dengan Pendapat salah seorang informan bahwa adanya kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah sebagai revitalisasi dalam mengefisienkan melalui pola perampingan struktur organisasi, sehingga tercipta pegawai yang mengisi jabatan tersebut memiliki kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan organisasi.

Dengan demikian bahwa Restrukturisasi kelembagaan institusi pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bima dalam kaitan dengan politik kekuasaan dalam mengisi kekosongan jabatan yang diperebutkan sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan tertentu. Walaupun restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah daerah merupakan tuntutan dalam mereformasikan birokrasi menuju tatanan birokrasi yang lebih baik kedepan.

4. Perumusan Penganggaran Pemerintah baik rutin maupun pembangunan

Dalam perumusan anggaran yang dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif dalam rapat paripurna baik ditingkat Fraksi, Komisi maupun ditingkat paripurna, terkait program-program daerah baik yang bersifat rutin maupun pembangunan (infrastruktur daerah) selama periode tertentu yang diperuntukan bagi pengelolaan birokrasi maupun bagi pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kinerjanya, sehingga setiap belanja harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah daerah. Politik bisa terlibat dalam segala urusan kenegaraan, termasuk didalamnya urusan finansial publik, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Teori politik keuangan negara yang baik adalah relatif tergantung ideologi suatu negara, artinya teori politik keuangan negara yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang memberi keleluasaan /kebebasan aktivitas politik dalam suatu Negara (Noer Fauzi dan R Yando Zakaria, dalam Bambang Utoyo, 2013, Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara, Unila). (*yang dikutip dalam <http://diqilib.unila.ac.id/3776/17/BAB%20II.pdf>*).

Dengan demikian bahwa intervensi politik dalam perumusan penganggaran keuangan daerah sangat tinggi, karena masing-masing pihak terkait merasa punya kepentingan yang sama pemerintah selaku pengelola keuangan daerah berkewajiban untuk menggunakan anggaran sesuai dengan pos anggaran yang telah diajukan dan tersedia di dalam dokumen keuangan daerah. Begitu juga pihak-pihak

legislatif (Anggota DPRD) memiliki hak yang sama karena merasa sudah merumuskan anggaran sesuai dengan tingkat kepentingan yang sama pula, artinya bahwa posanggaran yang telah di ketok oleh DPRD, sehingga melahirkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Daerah (APBD), menitipkan anggaran pada pos-pos keuangan tertentu yang memberi dampak bagi keuntungan baik Anggota DPRD itu sendiri lebih-lebih para konstituen dan para tim yang telah mendukung sebelumnya.

SIMPULAN

Model relasi politik birokrasi pada Pemerintah Kota Bima menunjukkan bahwa **Pertama**; Rekrutmen pejabat birokrasi terjadi konspirasi politik kekuasaan dalam seleksi pejabat birokrasi, tidak lagi dilihat pada perseptif uji kompetensi dan kepatutan, **Kedua**; Mutasi atau Rotasi Pejabat birokrasi Pemerintah Kota Bima selalu diwarnai dengan banyak kepentingan ditambah lagi adanya politik transaksional dalam mutasi dan rotasi pejabat birokrasi pemerintah Kota Bima, **ketiga**; Restrukturisasi kelembagaan institusi pemerintah karena dengan struktur gemuk, perlu dilakukan penataan kembali agar terjadi efisiensi baik struktur maupun penganggaran, dan **keempat**; Perumusan Penganggaran Pemerintah baik rutin maupun pembangunan selalu diwarnai adanya intervensi politik penganggaran keuangan daerah sangat tinggi, sehingga berimplikasi terhadap kepentingan-kepentingan politik yang mewarnai baik dalam perumusan, implementasi serta proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah Kota Bima.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Mbojo Bima, Ketua STISIP Mbojo Bima, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan SDM, Kepala LPPM, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah mendukung kegiatan riset ini yang terkait dengan Model Relasi Politik Birokrasi Dalam Persepsi Pejabat Publik (Studi Pada Pemerintahan Kota Bima) baik pada aspek penganggaran, administrasi dan teknis termasuk dukungan motivasi bagi peneliti itu sendiri. Disamping itu pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Bima yang telah mendukung penelitian ini dalam menyiapkan data dokumen maupun hasil wawancara, sehingga riset ini dapat terselesaikan tepat waktu untuk dapat di sampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional di Universitas Samawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, 2010, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*.
- Dwiyanto, Agus, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Effendi, Sofian, 2010, *Reformasi Tata Pemerintahan, menyiapkan Aparatur Negara Untuk mendukung Demokratisasi Politik Dan Ekonomi Terbuka*, Yogyakarta, Gadjah mada University Press.,
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005A. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Kerjasama antara MAP-UGM dan Pustaka Pelajar.

-
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005B. "Perkembangan Demokrasi dan Pengaruhnya terhadap Birokrasi Publik". *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*. Editor: Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo. Yogyakarta: Gava Media.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005C. "Format pembiayaan Publik dalam Sistem Semi-Parlementer". *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*. Editor: Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles and Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*, Sage Publication Ltd. 28 Banner Street London EC1Y 8QE, England
- Pramusinto, Agus, 2009, *Mengembangkan Budaya Kepemimpinan Profesional Birokrasi, dalam Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, Governance Reform Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta
- Putranto, Sulistiyo Agustinus, 2009, *Pengelolaan Kepegawaian (PNS) Sebagai Key Leverage Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, dalam Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, *Governance Reform Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta
- Thoha, Miftah, 2004, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
-, 2012, *Birokrasi Pemerintah Daerah di Era Reformasi*, Kencana Frenada Media Group, Jakarta
- Wantu, Mustapa, Sastro, 2011, *Rekrutmen Pejabat Di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Bureaucratic Politic*, Disertasi Yang 165
([http://www.transparansi.or.id/birokrat/Masih/Jadi/"Anak/Manis"/dalam/Pilkada.html](http://www.transparansi.or.id/birokrat/Masih/Jadi/)
<https://www.google.com/search?q=Politisasi+Biro-krasi%3A+Pola+Hub+Politik+dan+Birokrasi+di+Indonesia&oq=Politisasi+Birokrasi%3A+Pola+Hubungan+Politik+dan+Birokrasi+di+Indonesia&aqs=chrome..69i57j204>
<http://diqilib.unila.ac.id/3776/17/BAB%20II.pdf>).